

# LAPORAN KINERJA

TAHUN 2022

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PONTIANAK





## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2020.

Penyusunan laporan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun sebagai media pertanggungjawaban yang memuat informasi tentang pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak terdapat kekurangan, karena itu masukan dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan. Kiranya laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Pontianak,                      Maret 2022

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA PONTIANAK**

**drg. MULTI J. BHATARENDRO, MPPM**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19640114 198812 1 002



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
BAB II : PERENCANAAN KINERJA .....	10
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA .....	30
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	30
BAB IV : PENUTUP .....	76
LAMPIRAN : 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
2. Rencana Aksi 2022	
3. Renstra 2020 - 2024	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1), memiliki nomenklatur Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana (BP2KB), munculnya Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak menyebabkan perubahan nomenklatur nama BP2KB menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPMPAKB), dengan masuknya Urusan Pemberdayaan Masyarakat pada waktu itu BPMPAKB memiliki tiga urusan wajib yaitu Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Keluarga Berencana.

Pada tahun 2017, sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah nomenklatur BPMPAKB berubah menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), dengan kriteria tipologi A dan menjalankan urusan wajib bukan pelayanan dasar pemerintah yaitu bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak sesuai Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota dan tugas pembantuan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
  1. Kepala Subbagian Umum Dan Aparatur; Dan
  2. Kepala Subbagian Perencanaan;

- c. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk;
- d. Kepala Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera;
- e. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat;

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat; Berikut tugas pokok dari masing-masing jabatan yang ada di DP2KBP3A Kota Pontianak :

**a. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif.

**b. Sekretariat**

Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang kesekretariatan.

**c. Kasubbag Umum dan Aparatur**

Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang umum dan kepegawaian.

**d. Kasubbag Perencanaan**

Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang perencanaan.

**e. Kasubbag Keuangan**

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang Keuangan.

**f. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk**

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang Pengendalian Penduduk.

**g. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

**h. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat**

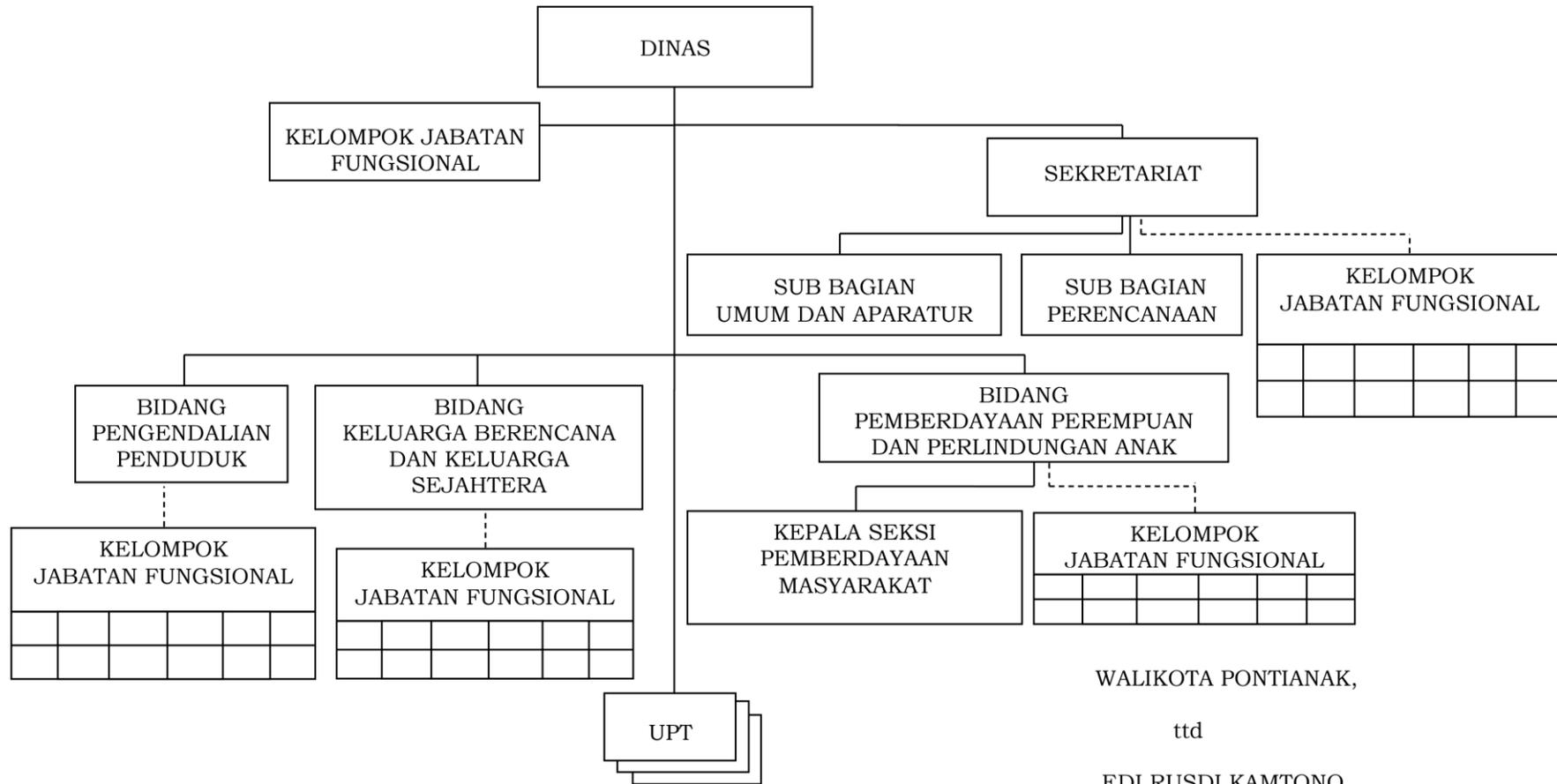
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**i. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam, mempunyai tugas pokok mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

**Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak**



Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak memerlukan berbagai sumber daya sebagai berikut :

### **1. Sumber Daya Manusia**

Sampai dengan tahun 2022 jumlah pegawai DP2KBP3A Kota Pontianak berjumlah 45 orang yang terdiri dari 32 orang pegawai berstatus ASN dan 13 orang pegawai berstatus non ASN.

Pegawai berpendidikan Strata 1 memiliki jumlah yang lebih banyak dibanding Pegawai dengan tingkat pendidikan lainnya yaitu sebanyak 23 Pegawai yang terdiri dari 21 orang ASN dan 2 orang pegawai non ASN, sedangkan Pegawai dengan tingkat Pendidikan D3 berjumlah 6 orang, semuanya berstatus ASN, Pegawai dengan tingkat Pendidikan Strata 2 berjumlah 4 orang, semuanya berstatus ASN dan pegawai dengan tingkat Pendidikan SMA berjumlah 12 orang, dengan rincian 1 orang berstatus ASN sedangkan 11 orang berstatus non ASN

### **2. Sarana dan Prasarana**

Sarana Prasarana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak terdiri dari: Gedung kantor, rumah shelter, kendaraan roda empat sebanyak 4 unit, kendaraan roda dua sebanyak 54 unit dan sarana pendukung lainnya seperti yang terdapat dalam kartu inventaris barang.

### **3. Sumber Dana**

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bersumber dari APBD Kota Pontianak. Penganggaran dana untuk kegiatan baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak telah mengacu kepada Kepmendagri Nomor 13

tahun 2006 yaitu melalui Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK). Rencana Strategis dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.

Sumber dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksana tugas Organisasi tahun 2022 bersumber dari APBD Kota Pontianak berupa Dokumen Anggaran 2022 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 14.179.151.317,00 dengan perincian sebagai berikut :

**Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp.)		BERTAMBAH/BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	0	0	0	0
	Jumlah Pendapatan	0	0	0	0
5	BELANJA DAERAH	15.167.388.687	14.179.151.317	(988.237.370,00)	(6,52)
5.1	BELANJA OPERASI	14.806.055.527	13.813.826.741	(992.228.786,00)	(6,70)
5.1.01	Belanja Pegawai	5.003.947.887	4.814.455.815	(189.492.072,00)	(3,79)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.502.107.640	7.899.370.926	(602.736.714,00)	(7,09)
5.1.05	Belanja Hibah	1.300.000.000	1.100.000.000	(200.000.000,00)	(15,38)
5.2	BELANJA MODAL	361.333.160	365.324.576	3.991.416,00	1,10
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.758.160	96.749.576	3.991.416,00	4,30
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	268.575.000	268.575.000	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	15.167.388.687	14.179.151.317	-988.237.370,00	-6,52
	Surplus/Defisit	-	-	-988.237.370,00	6,97
		15.167.388.687,00	14.179.151.317,00		

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berhadapan dengan permasalahan utama yang berasal dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

**a. Lingkungan Internal**

- a) Sarana dan prasarana belum memadai.
- b) Pengelolaan dan pengembangan data belum optimal.
- c) Masih kurangnya tenaga tekhnis yang mempunyai keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan bidangnya masing - masing.
- d) Jumlah personel yang belum memadai di bidang Pengendalian Penduduk dimana hanya tersedia 2 orang staf untuk membantu 2 kepala seksi.

**b. Lingkungan Eksternal**

- a) Masih adanya kematian Ibu Hamil muda.
- b) Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
- c) Penjualan Anak (Trafficking)
- d) Rendahnya kesadaran masyarakat Kurang Mampu dalam melakukan Program KB.

Mengacu kepada Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola pemerintahan di daerah disertai dengan penyerahan keuangan untuk dapat melaksanakan kewenangannya. Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan dalam penggunaan anggaran tersebut perlu disusun Laporan Kinerja seperti diatur dalam Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder*, sekaligus sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja agar terdapat upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah yang bersangkutan untuk memperbaiki kinerjanya di masa yang akan datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

B. REALISASI ANGGARAN

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN : 1. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022

2. RENCANA AKSI

3. RENSTRA 2020 - 2024

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis

Perencanaan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2020 berkaitan erat dengan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak yang tertuang dalam Rencana Strategis DP2KBP3A Kota Pontianak tahun 2020-2024 sebagai berikut:

##### 2.1.1 Visi dan Misi Walikota Pontianak

**PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA, BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG CERDAS DAN BERMARTABAT**

Untuk mewujudkan Visi Walikota tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian misi ke 1 yaitu **“Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya”** Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah **“Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak”**.

##### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran DP2KBP3A Kota Pontianak

Tujuan jangka panjang maupun jangka pendek (satu sampai dengan lima tahun) yang ingin dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak adalah sejalan dengan

tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Pontianak.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Adapun focus utama dari sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya baik manusia, prasarana dan sarana yang ada dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang, namun harus dapat dicapai serta berorientasi pada hasil.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak menetapkan sasaran serta indikator yang menjadi tolak ukur sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	: “ Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak”
OPD PENGAMPU	: Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
<b>1</b>	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,51%
<b>2</b>	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	93,98%
<b>3</b>	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya

## 2.2 Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama(IKU). Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Nomor 16 tahun 2021 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Indikator Kinerja Utama (IKU) DP2KBP3A  
Kota Pontianak 2022**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	1,51%
2	Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	93,98%
3	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya

### 2.3 Perjanjian Kinerja

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak pada Tahun Anggaran 2022 telah menandatangani Perjanjian Kinerja dengan Walikota Pontianak. Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani pada bulan Oktober 2022 sebagaimana terlampir pada laporan ini.

Penetapan Kinerja, yang kemudian disebut sebagai Perjanjian Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014, merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut PermenPAN No. 53 Tahun 2014, perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini, terwujudlah komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

**Perjanjian Kinerja DP2KBP3A  
Kota Pontianak 2**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	1,51%
2	Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	93,98%
3	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 dalam rangka mewujudkan sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran dan target yang ingin dicapai sebagaimana tertuang dalam IKU dan Perjanjian Kinerja 2022 adalah sebagai berikut :

### 1. SASARAN 1 : “Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk”

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022
1	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	1,51%

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk sasaran **1** Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan indikator Kinerja **Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak** pada tahun 2022 menargetkan 1,65% pertumbuhan penduduk Kota Pontianak, hal ini sesuai dengan Perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2022 antara Kepala Dinas dan Walikota Pontianak. Untuk mencapai target indikator tersebut dilaksanakan 3 (tiga) Program, 5 (lima) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan

#### a. Indikator “Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak”.

Strategi pencapaian Indikator ini melalui pelaksanaan 3 (tiga) Program, 5 (lima) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan sebagai berikut :

##### 1) Program Pengendalian Penduduk;

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target
1.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatnya implementasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk	a) TFR (Angka Kelahiran Total)	2,39%
			b) Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	549

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan sebagai berikut :

##### a) Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka

Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan target output kegiatan yaitu :

- (1) Persentase keterlibatan stackholder dalam pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
  - i. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota dengan target output sub kegiatan yaitu :
    - Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan sebanyak 1 Perda
  - b) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan target output kegiatan yaitu :
    - (1) persentase stachloder yang terlibat dalam Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
      - i. Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain dengan target output sub kegiatan yaitu :
        - Jumlah rumah data yang dibentuk sebanyak 2 rumah data
      - ii. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga dengan target output sub kegiatan yaitu :
        - Jumlah data dan informasi keluarga yang dikelola sebanyak 1 data
      - iii. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB dengan target output sub kegiatan yaitu :
        - Jumlah data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang dikelola sebanyak 30 data

## 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Meningkatnya kesertaan keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	a) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	70,48 %
			b) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	12,47 %

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 3 kegiatan dan 15 sub kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan output kegiatan yaitu:

(1) Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE) sebesar 100%

i. Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja dengan target output sub kegiatan yaitu :

- Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif sebanyak 1 Pokja

ii. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan target output sub kegiatan yaitu :

- Jumlah dukungan manajemen KIE dalam promosi program Bangga Kencana sebanyak 3 Jenis

iii. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang dengan target output sub kegiatan yaitu :

- Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik 4 kali

- iv. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) dengan target output sub kegiatan yaitu :
  - Jumlah Pelaksanaan Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan sebanyak 48 kegiatan
- v. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK dengan target output sub kegiatan yaitu :
  - Jumlah Balai Penyuluhan KB yang mendapatkan dana operasional dan sarana sebanyak 5 Balai KB
- vi. Pengendalian Program KKBPK dengan target output sub kegiatan yaitu :
  - Tersedianya laporan audit kasus stunting ditingkat kabupaten/kota 1 laporan
- b) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dengan output kegiatan yaitu:
  - (1) Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berdayaguna 100%
- vii. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dengan target output sub kegiatan yaitu :
  - Jumlah kader PPKBD dan Sub PPKBD yang mendapatkan dana operasional 116 kader
- c) Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan target output kegiatan yaitu :
  - (1) Persentase klinik KB swasta dan Pemerintah yang mendapatkan bantuan Obat-Obatan Habis Pakai Penunjang Pelayanan KB sebesar 100%
- i. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan

Termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan target output sub kegiatan yaitu :

- Jumlah klinik KB swasta dan Pemerintah yang mendapatkan bantuan Obat-Obatan Habis Pakai Penunjang Pelayanan KB sebanyak 86 Faskes
  - ii. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan target output sub kegiatan yaitu :
    - Jumlah PUS yang menggunakan MKJP 1834 akseptor
  - iii. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB dengan target output sub kegiatan yaitu :
    - Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan KB sebanyak 9 paket
  - iv. Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan target output sub kegiatan yaitu :
    - Jumlah Peserta Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sebanyak 50 peserta
  - v. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dengan target output sub kegiatan yaitu :
    - Jumlah Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang mendapatkan peningkatan kompetensi 93 peserta
- d) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dengan target output kegiatan yaitu :

(1) Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 15 ormas

i. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB dengan target output sub kegiatan yaitu :

- Jumlah kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 2 kegiatan

### 3) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target
1.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Mewujudkan Keluarga yang Mandiri, Tentram dan bahagia (keluarga berkualitas)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan seluruh wanita umur 25-49 tahun	19%

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan output kegiatan yaitu:

(1) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 60,12 %

i. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan target output sub kegiatan yaitu :

- Jumlah Penyediaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) sebanyak 22 paket

ii. Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,

PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan target output sub kegiatan yaitu :

- Jumlah peserta aktif yang mendapatkan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebanyak 50 Peserta
- iii. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan target output sub kegiatan yaitu :
- Tersedianya biaya operasional bagi pengelola dan kader Poktan sebanyak 12 bulan
- iv. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) dengan target output sub kegiatan yaitu :
- Jumlah kegiatan Promosi dan Sosialisasi Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga sebanyak 3 kegiatan

## 2. SASARAN 2 : “Meningkatkan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan”

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022
2	Meningkatkan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	93,88 %

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk sasaran **2** Meningkatkan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan indikator Kinerja **Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak** pada tahun 2022 menargetkan 93,88%, target tersebut sesuai dengan Perjanjian

kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2022 antara Kepala Dinas dan Walikota Pontianak. Untuk mencapai target indikator tersebut dilaksanakan 3 (tiga) Program 6 (enam) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan.

**Indikator “Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak”.**

Strategi pencapaian Indikator ini melalui pelaksanaan 2 (dua) Program dan 4 (empat) kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target
1.	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya Pengarus Utamaan Gender serta Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	a) Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Madya

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 3 (tiga) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target output kegiatan yaitu :

(1) Persentase ARG pada belanja langsung APBD sebesar 11,12%

- i. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG dengan target output yaitu :
  - Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota sebanyak 60 program

b) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target output kegiatan yaitu :

(1) persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi 100%

- i. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dengan target output yaitu :

- jumlah peserta aktif dalam sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi sebanyak 800 peserta
- c) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target output kegiatan yaitu :
- (1) Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan 100%
    - ii. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target output yaitu :
      - Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 50 orang

## 2) Program Perlindungan Perempuan

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target
1.	Program Perlindungan Perempuan	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,0038

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a) Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan target output kegiatan yaitu :
  - (1) Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani sebesar 100%

- i. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan target output yaitu :
- Jumlah rakor dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan sebanyak 3 kegiatan.
- b) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target output kegiatan yaitu :
- (1) Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota 3 lembaga
- i. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target output yaitu :
- Jangka waktu penyediaan rumah aman /shelter untuk perempuan dan anak korban kekerasan sepanjang 12 bulan
- ii. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target output yaitu :
- Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih 50 orang
- 3) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target
1.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase keterlibatan LPM dalam pembangunan Kelurahan	60%

a) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan target output kegiatan yaitu :

(1) persentase lembaga kemasyarakatan yang terlibat aktif dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan 60%

- i. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
  - Jumlah kelurahan yang dibina dalam lomba kelurahan 1 kelurahan
- ii. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
  - jumlah peserta yang mengikuti lomba TTG 30 peserta
- iii. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
  - fasilitasi tim penggerak PKK 36 kelompok

### 3. SASARAN 3 : “Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak”

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022
3	<b>Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak</b>	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk sasaran **3** Meningkatkan perlindungan terhadap anak dengan 1 Indikator Kinerja. Hal ini sesuai dengan Perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2022 antara

Kepala Dinas dan Walikota Pontianak. Untuk mencapai target indikator tersebut dilaksanakan 3 (tiga) Program 5 (lima) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan

#### 1) Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target
1.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	a) Persentase keterlibatan stackholder dalam pemutakhiran data Gender dan Anak	75%

a) Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target output kegiatan yaitu :

(1) Persentase data gender dan anak yang tersedia dan dimutakhirkan 100%

i. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

- Jumlah data Gender dan Anak yang tersedia 2 data

#### 2) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target
1.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak (PHA)	b) Persentase Forum Anak Daerah Aktif	100%

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 2 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target output kegiatan yaitu :

(1) Persentase pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha sebesar 30%

- i. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target output yaitu :
  - Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak sebanyak 20 Lembaga
- ii. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target output yaitu :
  - Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan 20%
- iii. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target output yaitu :
  - Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak 20 media massa
- iv. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target output yaitu :
  - jumlah Fasilitator Forum Anak yang mendapatkan orientasi dan peningkatan kapasitas 25 orang

## 3) Program Perlindungan Khusus Anak

No	Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program (Outcome)	Target
1.	Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak	a) Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota	100%

Pelaksanaan pencapaian indikator program didukung dengan 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan sebagai berikut :

a) Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dengan target output kegiatan yaitu :

(1) Persentase korban kekerasan anak yang terlayani sebesar 100%

i. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target output yaitu :

- Jumlah kasus anak mendapat mendampingan sebesar 76 kasus

ii. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target output yaitu :

- Jumlah kasus anak dan perempuan yang ditangani sebesar 150 kasus

b) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target output yaitu :

(1) Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan penguatan dan pengembangan 20%

i. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- terlaksananya kegiatan dan dukungan manajemen BOPPA 3 kegiatan
- ii. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Jumlah FAD yang mendapatkan penguatan dan fasilitasi 36 FAD

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2022, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada stakeholders atas penggunaan anggaran negara.

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan / kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan Dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Capaian kinerja yang ingin diketahui melalui pengukuran kinerja ini adalah adanya kesinambungan atau sinergi antara visi-misi-tujuan dan sasaran strategis dengan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui capaian kinerja tersebut, dokumen dan data kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja adalah :

1. Dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun 2021 (**Lampiran** );
2. Dokumen rencana kegiatan atau Rencana Aksi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 (**Lampiran** );
3. Dokumen penetapan kinerja (TAPKIN), sebagaimana termuat pada Penetapan Kinerja Tahun 2022 (**Lampiran** );
4. Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) beserta laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi penggunaan anggaran Tahun 2022.

Dalam laporan akuntabilitas ini, pengukuran capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak mencakup 7(tujuh) unsur utama, yaitu :

1. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara membandingkan antara Target outcome yang ditetapkan dari masing-masing Indikator kinerja sasaran dengan Realisasi dari sasaran yang dicapai.
2. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara membandingkan antara Realisasi kinerja sasaran serta Capaian kinerja sasaran Tahun 2022 dengan beberapa tahun terakhir.
3. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara membandingkan Realisasi kinerja sasaran dan Target Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Restra/ RPJMD.
4. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara membandingkan Realisasi kinerja sasaran Tahun 2022 dengan Standar Nasional

5. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara menganalisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak.
6. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara menganalisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya.
7. Pengukuran kinerja kegiatan, yang diarahkan pada pengukuran kinerja keluaran (output), dengan cara menganalisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja.

Analisis terhadap capaian kinerja sasaran dan kegiatan dalam laporan akuntabilitas kinerja ini menggunakan metode pengukuran sebagai berikut :

### **1. Metode Perbandingan Rencana dan Realisasi**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

## 2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing - masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Interval	Kategori
> 85	= Sangat Berhasil
70 < X ≤ 85	= Berhasil
55 < X ≤ 70	= Cukup Berhasil
≤ 55	Tidak Berhasil

Untuk capaian masing - masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "**Metode Rata - Rata Data Kelompok**". Penyimpulan capaian sasaran dengan "**Metode Rata- Rata Data Kelompok**" adalah penyimpulan pada tingkat sasaran yang dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai maen (rata - rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah Indikator untuk Setiap Kategori} \times \text{Nilai Mean Setiap Kegiatan}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Sasaran}}$$

Nilai mean setiap kategori adalah sebagai berikut :

Nilai Mean (x)	Kategori
92,5	= Sangat Berhasil
77,5	= Berhasil
62,5	= Cukup Berhasil
27,5	= Tidak Berhasil

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori **sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil** dan **tidak berhasil**.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah - langkah pemecahan masalah yang diambil Instansi Pemerintah Kota Pontianak dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing - masing indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan diatas, tingkat Pencapaian indikator sasaran DP2KBP3A Kota Pontianak Tahun 2022 dapat dilihat pada matrik sebagai berikut :

**Tabel. III.1**  
**Capaian Indikator Sasaran Strategis DP2KBP3A Kota Pontianak**  
**Tahun 2022**

No	Indikator Sasaran Strategis	Nilai Capaian	Skala Pengukuran Ordinal			
			$X > 85$	$70 < X \leq 85$	$55 < X \leq 70$	$X \leq 55$
1.	<b>Sasaran Strategis :</b>	<b>Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak</b>				
1.1	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	183,45%				
1.2	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	100,10%				
1.3	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya				
<b>Jumlah Keseluruhan Capaian</b>		<b>100%</b>				

Dari tabel diatas dapat terlihat dari 3 indikator sasaran, 3 indikator sasaran dikategorikan sangat baik.

Sasaran Strategis Pemerintah Kota Pontianak yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan di atas, tingkat pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- SASARAN STRATEGIS : “ Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak”
- OPD PENGAMPU : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,51%	0,96%
2	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	93,98%	94,10%
3	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya	Madya

Adapun Pengukuran Indikator Kinerja Utama pada sasaran DP2KBP3A Kota Pontianak, dapat dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut :

### 1. Membandingkan antara Target dan Realisasi

Tabel. III.2

#### Capaian Sasaran Strategis Pemerintah Kota Pontianak dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	<b>Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	1,51%	0,96%	183,45%
Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak		93,98%	94,10%	100,10%	
Tingkat Capaian Kota Layak Anak		Madya	Madya	Madya	

Sumber : BPS dan DP2KBP3A Kota Pontianak, 2021/2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sasaran strategis Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 3 indikator kinerja utama yaitu :

1) **“Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak”** dengan target 1,51% **berhasil** dicapai dengan realisasi jauh diatas yang telah ditargetkan yaitu 0,96% laju pertumbuhan kota Pontianak. Data merujuk pada data yang dikeluarkan oleh BPS Kota Pontianak dalam buku Kota Pontianak Dalam Angka 2023.

Capaian Indikator Kinerja Utama dikatakan **“Berhasil”** jika Realisasi lebih kecil atau sama dengan Target, dan sebaliknya Capaian Indikator Kinerja Utama dikatakan **“Tidak Berhasil”** jika Realisasi lebih besar dari Target.

Adapun Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Capaian Indikator Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota yaitu :

a. Program Pengendalian Penduduk;

Ada 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan yang dilaksanakan, terdapat 1 sub kegiatan yang capaiannya dibawah 90% karena ada efisiensi dalam realisasi makan minum kegiatan.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);

Ada 4 kegiatan dan 13 sub kegiatan yang dilaksanakan, terdapat 2 sub kegiatan yang capaian realisasi dibawah 80% dikarenakan sumber dana DAK Non Fisik BOKB. karena ada beberapa belanja yang tidak dapat diserap antara lain; distribusi alkon biaya pembelian bahan bakar tidak dapat diserap dikarenakan distribusi alkon menggunakan kendaraan dinas dan sewa dari pihak ke tiga, belanja jasa pelayanan KB MKJP tidak dapat diserap dikarenakan

tidak memenuhi target akseptor yang telah ditetapkan BKKBN Pusat sebanyak 1834 akseptor hanya terealisasi 985 akseptor.

- c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);  
Ada 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan yang dilaksanakan, terdapat 1 sub kegiatan yang capaian realisasinya dibawah 90% dikarenakan sumber dana DAK Non Fisik BOKB, realisasi sebesar 28,31% dikarenakan biaya operasional pendampingan Ibu Hamil, Calon Pengantin, Keluarga Beresiko Stunting dan dukungan biaya pulsa bagi surveilen TPK pendataan keluarga beresiko stunting tidak terserap.

2) Indikator kinerja utama **“Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak”** dengan target 93,92% **berhasil** dicapai dengan realisasi yaitu 94,10%, melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Capaian Indikator Kinerja Utama dikatakan **“Berhasil”** jika Realisasi lebih tinggi atau sama dengan Target, dan sebaliknya Capaian Indikator Kinerja Utama dikatakan **“Tidak Berhasil”** jika Realisasi lebih kecil dari Target.

Adapun Program yang mendukung Capaian **“Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak”** yaitu :

- a. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;  
Terdapat 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan yang dilaksanakan, seluruh sub kegiatan pencapaian target diatas 90%
- b. Program Perlindungan Perempuan;  
Ada 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan yang dilaksanakan, seluruh sub kegiatan pencapaian target diatas 90%.
- c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat;

Ada 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan yang dilaksanakan dan realisasi diatas 90%.

- 3) Indikator kinerja utama **“Tingkat Capaian Kota Layak Anak”** dengan target kategori Madya **berhasil** dicapai, berdasarkan penilaian dari kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2022 Kota Pontianak dianugerahkan kategori Madya untuk capaian Kota Layak Anak.

Capaian Indikator Kinerja Utama dikatakan **“Berhasil”** jika Realisasi lebih tinggi atau sama dengan Target, dan sebaliknya Capaian Indikator Kinerja Utama dikatakan **“Tidak Berhasil”** jika Realisasi lebih kecil dari Target.

Adapun Program yang mendukung capaian IKU diatas yaitu :

- a. Program Pengelolaan Data Gender dan Anak

Ada 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yang dilaksanakan,realisasi 100%,

- b. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);

Ada 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan yang dilaksanakan, trealisasi di atas sebesar 80%

- c. Program Perlindungan Khusus Anak;

Terdapat 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan, 3 sub kegiatan realisasi dibawah 80%, dikarenakan sumber pendanaan dari DAK Non Fisik, peruntukan belanja sudah ditetapkan oleh kementerian, sehingga daerah tidak bisa melakukan pergeseran anggaran yang tidak dapat diserap, belanja yang tidak dapat diserap yaitu belanja mediko legal, pemeriksaan untuk korban hidup dan meninggal (autopsi), bidang PPPA sudah menindaklanjuti melalui PKS dengan RS bhayangkara dan kepolisian, namun pihak kepolisian juga memiliki anggaran untuk Mediko legal, belanja lainnya yang tidak dapat diserap yaitu belanja tenaga ahli untuk

kasus persidangan, dan biaya penjangkauan korban diluar kota tidak dapat diserap karena bergantung pada ada tidaknya kasus tersebut.

## 2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan beberapa Tahun terakhir

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja DP2KBP3A Kota Pontianak Tahun 2022, juga dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan beberapa Tahun terakhir yaitu Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2019 dan di Tahun 2020. Berikut Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun sebelumnya, sebagai berikut :

**Tabel III.3**  
**Tabel Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran di Tahun 2022 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya**

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	1,51%	1,81%	1,02%	0,96%	187%
2.	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	93,98%	93,73%	94,01%	94,10%	100,13%
3.	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya	Pratama	Pratama	Madya	Madya

Sumber : BPS dan DP2KBP3A Kota Pontianak, 2021/2022

Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama, pada masing-masing Indikator sebagai berikut :

- 1) Dari tabel diatas terlihat bahwa tahun 2020 realisasi 1,81%, pada tahun 2021 laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan sebesar 0,79% menjau dari target yang ditetapkan, sedangkan untuk capaian pada tahun 2022 masih mengacu pada capaian tahun 2021, dikarenakan update data

belum tersedia oleh BPS Kota Pontianak dalam Buku Pontianak Dalam Angka Tahun 2022, untuk Indikator Kinerja Utama ” Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak” secara berturut – turut mencapai lebih dari 100%. Indikator dikatakan berhasil jika realisasi capaian lebih rendah dari target.

- 2) Dari tabel diatas terlihat bahwa Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak pada tahun 2020 realisasi kinerja 93,73% sedangkan pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 0,28% atau diangka 94,10% dan pada tahun 2022 (angka capaian masih menggunakan data tahun 2021, data dari BPS untuk capaian tahun 2022 belum tersedia), terjadi kenaikan angka Indeks Pembangunan Gender yang signifikan sebesar 0,28% atau diangka 94,10%. Hal ini berarti kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki semakin mengecil di beberapa bidang pembangunan. Adanya fluktuasi nilai IPG ini akibat perubahan dari sisi kecepatan capaian pembangunan laki-laki, yang memiliki akselerasi lebih tinggi. Terdapat peningkatan Indeks Pembangunan Gender dibandingkan tahun-tahun sebelumnya , adapun faktor pendukung meningkatkannya Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak tersebut dapat didukung dari :
- ✓ Sebagian OPD yang ada dikota Pontianak telah melakukan pemilahan data Gender.
  - ✓ Telah dilakukan sosialisasi terhadap OPD dan stackholder terkait berkenaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsife Gender
  - ✓ Sebagian OPD yang telah mendapat Sosialisasi PPRG telah menyusun Rencana Anggaran yang berbasis Gender
- 3) Tingkatan dalam pencapaian predikat Kota Layak Anak terdiri 5 tingkatan yaitu : Pratama ; Madya; Nindya; Utama; Kota Layak Anak. Indikator Kinerja Tingkat Capaian Kota Layak Anak antara periode 2020 dan 2021 menyandang predikat Pratama, sedangkan capaian tahun

2022 mengalami peningkatan capaian yaitu Madya, capaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Penilaian kota layak anak memiliki banyak indikator yang harus di isi dan dicapai yang melibatkan banyak stackholder baik dari Pemerintah maupun pihak Swasta. Indikator tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 12 Tahun 2011.

Sebuah Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), idealnya harus memenuhi semua indikator yang ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak (KHA). Untuk memudahkan klasifikasi pemenuhan hak anak tersebut, dilakukan pengelompokan indikator ke dalam 6 (enam) bagian, yang meliputi bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.

### 3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Renstra

**Tabel. III.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Tahun 2021 dan Target Jangka Menengah Renstra**

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Target Akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	1,51%	0,96%	1,11%
2	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	93,98%	94,10%	94,17%
3	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya	Madya	Utama

Sumber : BPS Kota Pontianak, 2021

Berikut ini Analisis Capaian Kinerja masing – masing Indikator :

- 1) Indikator Kinerja Utama Persentase Laju Pertumbuhan Kota Pontianak pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 1,51% dan terealisasi sebesar 0,96% serta untuk target jangka menengah sesuai

dokumen Renstra OPD DP2KBP3A pada tahun 2020 – 2024 target akhir Renstra ditargetkan penurunan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,11%. Dengan demikian realisasi Capaian Kinerja untuk 2022 jika diukur dengan capaian akhir Renstra telah terealisasi sebesar 119,11%. Capaian 2022 sudah melebihi target akhir renstra, namun capaian ini perlu di jaga dengan pelaksanaan program kegiatann antar lain melakukan penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) dan kemudian Dokumen tersebut diPerdakan.

Tujuan disusunnya GDPK sendiri setidaknya mencakup delapan hal: (1) Mewujudkan kualitas penduduk dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial, budaya berlandaskan iman dan taqwa, sehingga mampu berdaya saing dalam menghadapi tantangan kemajuan, (2) Mewujudkan kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, (3) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada wawasan kependudukan dan lingkungan, (4) Mewujudkan kesejahteraan penduduk melalui penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja, (5) Mewujudkan pengarahannya mobilitas penduduk secara merata antar wilayah kecamatan, (6) Mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga, (7) Mewujudkan tercapainya bonus demografi melalui pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk, (8) Mewujudkan data dan informasi kependudukan yang akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan.

- 2) Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak 93,98% dan terealisasi sebesar 94,10% serta untuk target jangka menengah sesuai dokumen Renstra OPD DP2KBP3A pada tahun 2020 - 2024 ditargetkan pertumbuhan Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak pada angka 94,17%. Pencapaian pada tahun ini hampir memenuhi target Jangka Menengah Renstra OPD DP2KBP3A, realiasi terhadap target Jangka Menengah Renstra sebesar 99,83%. Hal ini perlu dijaga terus secara konsisten, agar dalam perjalanannya dalam tahun –tahun kedepan pencapaian Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak dapat meningkat dan mencapai target akhir Renstra.
- 4) Indikator Kinerja Utama Tingkat Capaian Kota Layak Anak terealisasi predikat Pratama pada tahun 2022, dimana pada akhir periode Renstra Perangkat daerah menargetkan Predikat Utama Kota Layak Anak. Untuk mencapai tersebut masih terpaut 2 tingkatan lagi untuk mencapainya. Sebagai informasi, pencapaian predikat Kota Layak Anak terdiri 5 tingkatan yaitu : Pratama ; Madya; Nindya; Utama; Kota Layak Anak.

#### **4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional**

**Tabel. III.5**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022**  
**Dengan Standar Nasional**

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Standar Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	1,51%	0,96%	1,11
2	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	93,98%	94,10%	91,28%
3	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya	Madya	-

Sumber : BPS dan DP2KBP3A Kota Pontianak, 2021/2022

Dari tabel terlihat bahwa, analisis Capaian Kinerja masing-masing Indikator dengan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional, yaitu sebagai berikut :

- 1) Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa untuk Indikator Kinerja Utama Persentase Laju Pertumbuhan Kota Pontianak pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 1,51% dan terealisasi sebesar 0,96% dibandingkan dengan target Jangka Menengah dari kementerian terkait yaitu BKKBN Pusat sebesar 1,11% sudah diatas target Nasional.

Langkah – langkah kedepan yang akan diambil untuk menjaga capaian kinerja adalah dengan penjarangan akseptor KB PUS dan unmet need melalui berbagai metode promosi KB baik melalui media elektronik, jejaring media sosial dan kegiatan pencanangan KB serta penyediaan alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP) bagi masyarakat miskin.

- 2) Persentase capaian kinerja IKU Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak tahun 2022 telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 94,10%. Sedangkan untuk perbandingan pencapaian target ditingkat nasional, seperti yang tertera pada Rencana Strategis Kementerian PPPA Periode 2020 – 2024 pada tahun 2021 ditargetkan 91,28 %. Artinya capaian IPG Kota Pontianak telah melebihi target yang ditetapkan secara nasional. Tercapainya dari target tingkat kota maupun provinsi maupun nasional dapat dimungkinkan dari berbagai faktor seperti:

- ✓ Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi semakin tinggi di Kota Pontianak, sehingga kesenjangan

pembangunan antara Perempuan dan Laki-laki semakin mengecil.

- ✓ Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di Kota Pontianak.

3) Dari indikator kinerja utama Tingkat Capaian Kota Layak Anak, tidak ada standar nasional yang dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja Indikator Kinerja Utama tersebut diatas.

### **5. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.**

Pada Tabel III.6 menyajikan Analisis Penyebab dan Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi Penurunan Capaian ataupun mengoptimalkan Capaian.

**Tabel. III.6**  
**Analisis Penyebab Peningkatan/ Penurunan Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pontianak Serta Alternatif Solusi yang dilakukan di Tahun 2022**

No (1)	Indikator Kinerja Utama (2)	Peningkatan/ Penurunan (3)	Penyebab (4)	Solusi yang dilakukan (5)
1.	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	Peningkatan	1. Belum tersusunnya dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diperdakan 2. Kota Pontianak sebagai ibu kota Provinsi, pertumbuhan penduduk dipengaruhi urbanisasi 3. masih tingginya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet	1. Melakukan penyusunan GDPK 2. Menggencarkan penjangkaran dan melakukan advokasi dan promosi lewat PLKB dan kelompok Tribina KB 3. Melakukan promosi yang efektif melalui media cetak dan elektronik serta promosi program KB melalui kampung-kampung KB yang telah terbentuk 4. Memaksimalkan peran kader dan PLKB dalam melakukan

No (1)	Indikator Kinerja Utama (2)	Peningkatan/ Penurunan (3)	Penyebab (4)	Solusi yang dilakukan (5)
			<p>need) angka 2021 12,70%</p> <p>4. masih banyak PUS yang menggunakan ALKON Jangka pendek, angka 2021 jumlah PUS yang menggunakan MKJP 19,11%</p> <p>5. Belum terbentuknya Pokja KKBPK dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, stakeholder dan forum masyarakat kampung KB dalam memberikan penyuluhan dan informasi tentang program-program KB serta mensukseskan program-program KB</p>	<p>penjaringan PUS dan melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan MKJP</p> <p>5. Menyediakan pelayanan MKJP gratis untuk masyarakat kurang mampu</p> <p>6. Memaksimalkan peran Kampung KB dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas</p> <p>7. Membentuk Pokja KKBPK dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, stakeholder dan forum masyarakat kampung KB dalam memberikan penyuluhan dan informasi tentang program-program KB serta mensukseskan program-program KB</p>
2	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	Peningkatan	<p>1. tujuh Prasyarat PUG yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, alat analisis, data terpilah, dan dukungan publik, belum seluruhnya dipenuhi oleh OPD yang ada di Kota Pontianak</p> <p>2. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan</p>	<p>1. Menuangkan kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di Kota Pontianak.</p> <p>2. Memperkecil kesenjangan pembangunan antara Perempuan dan Laki-laki dengan meningkatkan IPM</p>

No (1)	Indikator Kinerja Utama (2)	Peningkatan/ Penurunan (3)	Penyebab (4)	Solusi yang dilakukan (5)
			kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	
			3. Masih tingginya rasio kekerasan terhadap perempuan yaitu 7/100.000 penduduk perempuan, pada tahun 2022 terdapat 26 kasus kekerasan terhadap perempuan	3. pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan melalui Program Pengarustamaan Gender yang telah dilakukan setiap tahun
			4. Masih rendahnya program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender, capaian tahun 2022 103 program yang telah dievaluasi	4. melakukan Inovasi pelayanan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dengan yaitu Inovasi LARA EMAKK (Layanan Perlindungan Respon Cepat BerEmpati) 5. memperkuat Kader Pendamping perempuan untuk memitigasi dan pendampingan kasus kekerasan pada perempuan mulai dari tingkat kelurahan
3	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Menurun	1. Belum terlaksananya Konveksi Hak Anak (KHA)	1. Mengadakan Konvensi Hak Anak (KHA) yang melibatkan seluruh stackholder terkait, termasuk dari kementerian
			2. Sulitnya mengumpulkan basis data gender dan anak, karena data dimiliki oleh lintas sektoral	2. Memaksimalkan peran swasta dan dunia usaha dengan membentuk wadah
			3. Masih ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan	3. Memaksimalkan peran masyarakat untuk mengkampanyekan dan menerapkan nilai – nilai yang menjunjung tinggi hak – hak anak untuk pencapaian Pontianak Sebagai Kota Layak Anak

No (1)	Indikator Kinerja Utama (2)	Peningkatan/ Penurunan (3)	Penyebab (4)	Solusi yang dilakukan (5)
			4. Belum tersedianya informasi untuk call center pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	4. Memaksimalkan peran kader pendamping anak
			5. Belum maksimalnya peran Sektor swasta dan dunia usaha dalam mendukung pencapaian Pontianak sebagai Kota Layak Anak	5. Menggalakan lagi sosialisasi perlindungan terhadap perempuan dan anak, melalui kegiatan Kampanye Perlindungan Anak, melalui forum PUSPA, Forum Anak Daerah
			6. Kasus kekerasan terhadap anak masih tinggi, tahun 2022 terdapat 87	6. Membuat Call Center pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

Dari Tabel dapat disampaikan Analisis Penyebab dan Solusi mengatasi masalah yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Indikator Kinerja Utama Persentase Laju Pertumbuhan Kota Pontianak pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 1,51% dan terealisasi sebesar 0,96% dibandingkan dengan target Jangka Menengah dari kementerian terkait yaitu BKKBN sebesar 1,11% memang masih sedikit tertinggal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:
  - a) Belum tersusunnya dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diperdakan
  - b) Masih tingginya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) dikota Pontianak sampai dengan tahun 2021 12,70%, jauh dibawah target nasional sebesar 8,60%.
  - c) kurangnya kesadaran masyarakat dalam ber KB

- d) masih banyak PUS (Pasangan Usia Subur) yang menggunakan ALKON Jangka pendek, angka 2021 jumlah PUS yang menggunakan MKJP 19,11%
- e) Belum terbentuknya Pokja KKBPk dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, stakeholder dan forum masyarakat kampung KB dalam memberikan penyuluhan dan informasi tentang program-program KB serta mensukseskan program-program KB.

Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut diatas yaitu :

- a) Melakukan penyusunan GDPK yang bermanfaat untuk menyediakan kerangka pikir dan panduan (road map) untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan
- b) Menggencarkan penjangkaran dan melakukan advokasi dan promosi lewat PLKB dan kelompok Tribina KB
- c) Melakukan promosi yang efektif melalui media cetak dan elektronik serta promosi program KB melalui kampung-kampung KB yang telah terbentuk
- d) Memaksimalkan peran kader dan PLKB dalam melakukan penjangkaran PUS dan melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan MKJP
- e) Menyediakan Alat Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) secara gratis, dan khusus untuk MKJP Medis Operasi Wanita (MOW) dan Medis Operasi Pria (MOP) akan digratiskan pelayanannya khusus untuk masyarakat miskin yang tidak dicover oleh BPJS Kesehatan dan selain akan digratiskan, akseptor tersebut juga diberikan barang kebutuhan pokok untuk pengganti biaya hidup semasa mereka mendapatkan pelayanan pemasangan MOP dan

MOW, hal ini diharapkan dapat meningkatkan penggunaan MKJP.

- f) Memaksimalkan peran Kampung KB dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.
- g) Membentuk Pokja KKBPK dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, stakeholder dan forum masyarakat kampung KB dalam memberikan penyuluhan dan informasi tentang program-program KB serta mensukseskan program-program KB

## 2) Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak

Faktor penghambat pencapaian IKU

- a) Meskipun PUG telah menjadi strategi nasional, tujuh Prasyarat PUG yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, alat analisis, data terpilah, dan dukungan publik, belum seluruhnya dipenuhi oleh OPD yang ada di Kota Pontianak. Integrasi gender di dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik di tingkat OPD Kota Pontianak masih harus diperkuat.
- b) Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan
- c) Masih tingginya rasio kekerasan terhadap perempuan yaitu 7/100.000 penduduk perempuan, pada tahun 2022 terdapat 26 kasus kekerasanterhadap perempuan
- d) Masih rendahnya program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender, capaian tahun 2022 103 program yang telah dievaluasi

Solusi yang dilakukan:

- a) Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di Kota Pontianak.
  - b) Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi semakin tinggi di Kota Pontianak, sehingga kesenjangan pembangunan antara Perempuan dan Laki-laki semakin mengecil.
  - c) Perspektif gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan melalui Program Pengarustamaan Gender yang telah dilakukan setiap tahun dan terus di evaluasi untuk meningkatkan pencapaian tujuan.
  - d) melakukan Inovasi pelayanan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dengan yaitu Inovasi LARA EMAKK (Layanan Perlindungan Respon Cepat BerEmpati)
  - e) memperkuat Kader Pendamping perempuan untuk memitigasi dan pendampingan kasus kekerasan pada perempuan mulai dari tingkat kelurahan
- 3) Indikator Utama Tingkat Capaian Kota Layak Anak
- Faktor penghambat:
- a) Belum terlaksananya Konveksi Hak Anak (KHA) yang dalam bobot penilaian Kota Layak Anak memiliki nilai tertinggi yaitu 60 point.
  - b) Sulitnya mengumpulkan basis data gender dan anak, karena data dimiliki oleh lintas sektoral

- c) Masih ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan dari korban kekerasan kepada DP2KBP3A Kota Pontianak
- d) Belum tersedianya informasi untuk call center pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
- e) Belum maksimalnya peran Sektor swasta dan dunia usaha merupakan kelompok potensial dalam masyarakat yang memfasilitasi dukungan pendanaan yang bersumber dari alokasi Corporate Social Responsibility untuk mendukung terwujudnya KLA
- f) Belum maksimalnya peran dalam menggerakkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan KLA.
- g) Kasus kekerasan terhadap anak masih tinggi, tahun 2022 terdapat 87

langkah yang akan dilakukan kedepan untuk pencapaian target

IKU :

- a) Mengadakan Konvensi Hak Anak (KHA) yang melibatkan seluruh stackholder terkait, termasuk dari kementerian
- b) Memaksimalkan peran swasta dengan membentuk wadah / kelompok dunia usaha yang ramah anak dan peduli akan hak – hak anak
- c) Memaksimalkan peran masyarakat untuk mengkampanyekan dan menerapkan nilai – nilai yang menjunjung tinggi hak – hak anak untuk pencapaian Pontianak Sebagai Kota Layak Anak.
- d) Memaksimalkan peran kader pendamping anak yang ada di setiap kelurahan sebagai ujung tombang dalam mengidentifikasi dan memitigasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- e) Lebih menggalakan lagi sosialisasi perlindungan terhadap perempuan dan anak, melalui kegiatan Kampanye Perlindungan

Anak, melalui forum PUSPA, Forum Anak Daerah dan kegiatan sosialisasi yang langsung dilakukan di sekolah dan keluarahan

f) Membuat Call Center pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

## 6. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel. III.7**  
**Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**  
**Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis /IKU	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target		Realisasi			%		Tingkat Efisiensi		
								Kinerja	Rp.	Rp.	%	
1	3	4	6		7			8=(7/6) x 100%		9	10	
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2,4 549	persen kelahiran	151.683.644	2,06 110	persen kelahiran	143.655.873	86,19 20,04	94,71	8.027.771,00	5,29
2		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	70,48 8	persen persen	1.969.179.800	70,57 12,7	persen persen	1.447.834.426	100,13 158,75	73,52	521.345.374	26,48
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	19,00	persen	3.554.094.600	22,35	persen	1.314.035.500	117,63	36,97	2.240.059.100	63,03
4	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pratama	Kategori	153.746.900	Madya	kategori	149.746.300	100	97,40	4.000.600,00	2,60
5		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	0,0038	rasio	287.577.500	0,0073	rasio	275.508.800	192,11	95,80	12.068.700,00	4,20
6		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	60	persen	1.352.523.800	60	persen	1.352.496.533	100	100,00	27.267,00	0,00
7	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	75	persen	9.309.800,00	100	persen	9.309.800,00	133,33	100,00	-	0,00
8		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	100	persen	146.994.900	100	persen	135.744.900	100	92,35	11.250.000,00	7,65
9		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	100	persen	470.268.500	100	persen	285.320.658	100	60,67	184.947.842	39,33

Dari tabel diuraikan Analisis efisiensi Penggunaan untuk masing – masing Indikator adalah sebagai berikut :

- 1) Indikator Kinerja Utama Laju pertumbuhan penduduk kota Pontianak terealisasi 0,96% dengan anggaran terkait 3 (tiga) Program, 5 (lima) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan sebesar Rp. 5.674.958.044 terealisasi Rp. 2.905.525.799 atau sebesar 51,20%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan serapan anggaran 51,20% dan hanya didukung oleh jumlah SDM yang terbatas, terdiri dari dua bidang yaitu Bidang Keluarga Berencana dan Bidang Pengendalian Penduduk dengan total jumlah personil yaitu 8 orang yang terdiri dari 2 orang Kabid, 2 orang Fungsional/Sub Koordinator dan 4 orang staf, target IKU tetap bisa dicapai 0,96% diatas target yang telah ditetapkan, dengan demikian terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.769.432.245. Efisiensi sebagian besar karena biaya operasional Tim Pendamping Keluarga (TPK) tidak terserap maksimal, karena sasaran Catin, Keluarga Beresiko Stunting dan Pendampingan Ibu Pasca Melahirkan tidak terserap sesuai target.
- 2) Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak terealisasi 94,10% dengan anggaran terkait dari 3 (tiga) Program 6 (enam) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan sebesar Rp. 1.793.848.200 terealisasi Rp. 1.777.751.633 atau sebesar 99,10%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan serapan anggaran 99,10%, dan hanya didukung oleh jumlah SDM yang terbatas yaitu 5 orang yang terdiri dari 1 orang Kabid, 1 orang Kasi, 1 orang Fungsional/Sub Koordinator dan 2 orang staf, target IKU tetap bisa dicapai melampaui target yaitu 94,10% IPG Kota Pontianak atau tercapai 100,10% dari target yang ditetapkan yaitu 93,89% IPG Kota Pontianak, selain itu capaian itu juga telah melebihi target nasional sebesar 91,28% target

IPG Nasional, dengan demikian terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 16.096.567.

- 3) Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari Indikator Kinerja Utama Tingkat Capaian Kota Layak Anak didukung dengan anggaran terkait dari 3 (tiga) Program 5 (lima) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan sebesar Rp. 626.573.200 terealisasi Rp. 430.375.358 atau sebesar 68,69%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan serapan anggaran 68,69%, dan hanya didukung oleh jumlah SDM yang terbatas yaitu 6 orang SDM yang terdiri dari 1 orang Kabid, 1 orang Fungsional/Sub Koordinator dan 2 orang staf, target IKU dicapai sesuai target.

#### **7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Adapun analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	IKU	Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		%	Penjelasan Gagal/ Berhasil
					6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) x 100%	9		
	Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,39	perse n	2,06	pers en	86,19	Realisasi Indikator Program 2,06%, lebih rendah dari target 2,39% . Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 86,19%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
			Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	549	kelah iran	110	kela hira n	20,04	Realisasi Indikator Program 110 kelahiran, lebih rendah dari target 549 kelahiran . Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 20,03%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"	
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase keterlibatan stackholder dalam pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	100	perse n	100	pers en	100,00	Realisasi Indikator Kegiatan 100% sama dengan target 100%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"

No	Sasaran Strategis	IKU	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target		Realisasi		%	Penjelasan Gagal/ Berhasil
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8=(7/6) x 100%	9
			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	1	perda	1	perda	100,00	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 1 Perda sama dengan target 1 Perda. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
			<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>persentase stachloder yang terlibat dalam Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>80</b>	<b>perse n</b>	<b>80</b>	<b>pers en</b>	<b>100,00</b>	<b>Realisasi Indikator Kegiatan 80% sama dengan target 80%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"</b>
			Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah rumah data yang dibentuk	2	rumah data	2	rumah data	100,00	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 2 rumah data sama dengan target 2 rumah data. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
			Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah data dan informasi keluarga yang dikelola	1	data	1	data	100,00	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 1 data sama dengan target 1 data. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"

No	Sasaran Strategis	IKU	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target		Realisasi		%	Penjelasan Gagal/ Berhasil
1	2	3	4	5	6		7		8=(7/6) x 100%	9
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang dikelola	30	data	30	data	100,00	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 30 data sama dengan target 30 data. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
			<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)</b>	<b>70,48</b>	<b>persen</b>	<b>70,57</b>	<b>persen</b>	<b>100,13</b>	<b>Realisasi Indikator Program 70,57%, lebih tinggi dari target 70,48% . Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100,13%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"</b>
				<b>Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)</b>	<b>8</b>	<b>persen</b>	<b>12,7</b>	<b>persen</b>	<b>158,75</b>	<b>Realisasi Indikator Program 12,70%, lebih rendah dari target 8% . Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 158,75%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Tidak Berhasil"</b>
			<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>100,00</b>	<b>Realisasi Indikator Kegiatan 100% sama dengan target 100%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"</b>

No	Sasaran Strategis	IKU	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target		Realisasi		%	Penjelasan Gagal/ Berhasil
					6	7	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8=(7/6) x 100%	9
			Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	1	Pokja	1	Pokja	100,00	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 1 Pokja sama dengan target 1 Pokja. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah dukungan manajemen KIE dalam promosi program Bangsa Kencana	3	jenis KIE	3	jenis KIE	100,00	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 3 Jenis KIE sama dengan target 3 Jenis KIE. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik	4	kali	4	kali	100,00	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 4 kali sama dengan target 4 kali. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Pelaksanaan Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan	48	kegiatan	48	kegiatan	100,00	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 48 kegiatan sama dengan target 48 kegiatan. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"

No	Sasaran Strategis	IKU	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		%	Penjelasan Gagal/ Berhasil
					6		7			
1	2	3	4	5	6		7		8=(7/6) x 100%	9
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan KB yang mendapatkan dana operasional dan sarana	5	Balai Penyuluhan	6	Balai Penyuluhan	120,00	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 6 Balai Penyuluhan KB lebih tinggi dari target 5 Balai Penyuluhan KB. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 120%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
			Pengendalian Program KKBPK	Tersedianya laporan audit kasus stunting ditingkat kabupaten/kota	1	laporan	1	laporan	100,00	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 1 laporan sama dengan target 1 laporan. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berdayaguna	100	persen	100	persen	100,00	Realisasi Indikator Kegiatan 100% sama dengan target 100%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader PPKBD dan Sub PPKBD yang mendapatkan dana operasional	116	kader	116	kader	100,00	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 116 kader sama dengan target 116 kader. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"

No	Sasaran Strategis	IKU	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		%	Penjelasan Gagal/ Berhasil
					6	7	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8=(7/6) x 100%	9
			<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase klinik KB swasta dan Pemerintah yang mendapatkan bantuan Obat-Obatan Habis Pakai Penunjang Pelayanan KB</b>	<b>100</b>	<b>perse n</b>	<b>100</b>	<b>pers en</b>	<b>100,00</b>	<b>Realisasi Indikator Kegiatan 100% sama dengan target 100%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"</b>
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah klinik KB swasta dan Pemerintah yang mendapatkan bantuan Obat-Obatan Habis Pakai Penunjang Pelayanan KB	86	faskes	86	faskes	100,00	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 86 Faskes sama dengan target 86 Faskes. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah PUS yang menggunakan MKJP	1834	akseptor	985	akseptor	53,71	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 985 akseptor lebih rendah dari target 1834 akseptor. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 53,71%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Tidak Berhasil"
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan KB	9	paket	9	paket	100,00	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 9 paket sama dengan target 9 paket. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"

No	Sasaran Strategis	IKU	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target		Realisasi		%	Penjelasan Gagal/ Berhasil
1	2	3	4	5	6		7		8=(7/6) x 100%	9
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Peserta Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	50	peserta	50	peserta	100,00	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 50 peserta sama dengan target 50 peserta. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
			Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang mendapatkan peningkatan kompetensi	93	peserta	93	peserta	100,00	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 93peserta sama dengan target 93 peserta. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	15	ormas	15	ormas	100,00	Realisasi Indikator Kegiatan 15 ormas sama dengan target 15 ormas. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	2	kegiatan	2	kegiatan	100,00	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 2 kegiatan sama dengan target 2 kegiatan. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"

No	Sasaran Strategis	IKU	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target		Realisasi		%	Penjelasan Gagal/ Berhasil
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8=(7/6) x 100%	9
			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun</b>	19,00	perse n	22,35	pers en	117,63	<b>Realisasi Indikator Program 22,35%, lebih tinggi dari target 19,00% . Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 117,63%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"</b>
			<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)</b>	60,12	perse n	51,82	pers en	86,19	<b>Realisasi Indikator Kegiatan 51,82% lebih rendah dari target 60,12%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 86,19%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"</b>
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Penyediaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	22	paket	22	pak et	100,00	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 22 paket sama dengan target 22 paket. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"

No	Sasaran Strategis	IKU	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target		Realisasi		%	Penjelasan Gagal/ Berhasil
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta aktif yang mendapatkan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	50	peserta	50	peserta	100,00	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 50 peserta sama dengan target 50 peserta. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya biaya operasional bagi pengelola dan kader Poktan	12	bulan	9	bulan	75,00	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 9 bulan lebih rendah dari target 12 bulan. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 75%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Berhasil"
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah kegiatan Promosi dan Sosialisasi Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga	3	kegiatan	1	kegiatan	33,33	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 1 kegiatan lebih rendah dari target 3 kegiatan. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 33,33%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Tidak Berhasil"

No	Sasaran Strategis	IKU	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target		Realisasi		%	Penjelasan Gagal/ Berhasil
					6	7	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak</b>	<b>PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)</b>	Pratama	Kategori	Madya	kategori	100	<b>Realisasi Indikator Program Madya lebih dari target Pratama. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar Madya. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"</b>
			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	<b>Persentase ARG pada belanja langsung APBD</b>	11,12	persen	39,16	persen	352,15 827	<b>Realisasi Indikator Kegiatan 39,16% lebih dari target 11,12%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 352,16%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"</b>
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	60	Program	60	Program	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 60 Program sama dengan target 60 Program. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori " <b>Sangat Berhasil</b> "
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	<b>persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi</b>	100	persen	100	persen	100	<b>Realisasi Indikator Kegiatan 100% lebih dari target 100%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"</b>
			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	jumlah peserta aktif dalam sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di	800	peserta	800	peserta	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 800 peserta sama dengan target 800 peserta. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%.

No	Sasaran Strategis	IKU	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		%	Penjelasan Gagal/ Berhasil
1	2	3	4	5	6	7	8	9	$8 = \frac{7}{6} \times 100\%$	9
				bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi						Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan	100	persen	100	persen	100	Realisasi Indikator Kegiatan 100% lebih dari target 100%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50	orang	50	orang	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 50 orang sama dengan target 50 orang. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,0038	rasio	0,0073	rasio	192,10526	Realisasi Indikator Program 0,0073% lebih rendah target 0,0038%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 192,11%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Tidak Berhasil"
			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	persen	100	persen	100	Realisasi Indikator Kegiatan 100% lebih dari target 100%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%.

No	Sasaran Strategis	IKU	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		%	Penjelasan Gagal/ Berhasil
1	2	3	4	5	6	7	8	9	$8 = \frac{7}{6} \times 100\%$	9
										<b>Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"</b>
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rakor dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	3	kegiatan	3	kegiatan	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 3 kegiatan sama dengan target 3 kegiatan. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori " <b>Sangat Berhasil</b> "
			<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	3	lembaga	3	lembaga	100	<b>Realisasi Indikator Kegiatan 3 lembaga sama dengan target 3 lembaga. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"</b>
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jangka waktu penyediaan rumah aman /shelter untuk perempuan dan anak korban kekerasan	12	bulan	12	bulan	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 12 bulan sama dengan target 12 bulan. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori " <b>Sangat Berhasil</b> "
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	50	orang	50	orang	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 50 orang sama dengan target 50 orang. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori " <b>Sangat Berhasil</b> "

No	Sasaran Strategis	IKU	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target		Realisasi		%	Penjelasan Gagal/ Berhasil
1	2	3	4	5	6		7		8=(7/6) x 100%	9
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase keterlibatan LPM dalam pembangunan Kelurahan	60	persen	60	persen	100	Realisasi Indikator Program 60% sama dengan target 60%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 133,33%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase lembaga kemasyarakatan yang terlibat aktif dalam pemberdayaan masyarakat kelurahan	60	persen	60	persen	100	Realisasi Indikator Kegiatan 60% sama dengan target 60%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kelurahan yang dibina dalam lomba kelurahan	1	kelurahan	1	kelurahan	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 1 kelurahan sama dengan target 1 kelurahan. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	jumlah peserta yang mengikuti lomba TTG	30	peserta	30	peserta	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 30 Peserta sama dengan target 30 Peserta. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"

No	Sasaran Strategis	IKU	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target		Realisasi		%	Penjelasan Gagal/ Berhasil
1	2	3	4	5	6		7		8=(7/6) x 100%	9
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	fasilitasi tim penggerak PKK	36	kelompok	36	kelompok	100	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 36 kelompok sama dengan target 36 kelompok. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori " <b>Sangat Berhasil</b> "
		<b>Tingkat Capaian Kota Layak Anak</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Persentase keterlibatan stackholder dalam pemutakhiran data Gender dan Anak</b>	75	persen	100	persen	133,33	<b>Realisasi Indikator Program 100% lebih tinggi dari target 75%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 133,33%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"</b>
			<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase data gender dan anak yang tersedia dan dimutakhirkan</b>	100	persen	100	persen	100,00	<b>Realisasi Indikator Kegiatan 100% sama dengan target 100%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"</b>
			Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah data Gender dan Anak yang tersedia	2	data	2	data	100,00	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 2 data sama dengan target 2 data. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori " <b>Sangat Berhasil</b> "

No	Sasaran Strategis	IKU	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target		Realisasi		%	Penjelasan Gagal/ Berhasil
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
			<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Persentase Forum Anak Daerah Aktif</b>	100	persen	100	persen	100,00	<b>Realisasi Indikator Program 100% sama dengan target 100%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 133,33%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"</b>
			<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha</b>	30,0	persen	30	persen	100,00	<b>Realisasi Indikator Kegiatan 30% sama dengan target 30%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"</b>
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	20	lembaga	20	lembaga	100,00	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 20 lembaga sama dengan target 20 lembaga. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
			<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang</b>	20	persen	20	persen	100,00	<b>Realisasi Indikator Kegiatan 20% sama dengan target 20% . Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"</b>

No	Sasaran Strategis	IKU	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		%	Penjelasan Gagal/ Berhasil
					6		7			
1	2	3	4	5	6		7		$8 = \frac{7}{6} \times 100\%$	9
				<b>mendapatkan penguatan dan pengembangan</b>						
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	20	Media Massa	20	Media Massa	<b>100,00</b>	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 20 media massa sama dengan target 20 media massa. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori <b>"Sangat Berhasil"</b>
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Fasilitator Forum Anak yang mendapatkan orientasi dan peningkatan kapasitas	25	orang	25	orang	<b>100,00</b>	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 25 orang sama dengan target 25 orang. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori <b>"Sangat Berhasil"</b>
			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>100,00</b>	<b>Realisasi Indikator Program 100% sama dengan target 100%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 133,33%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"</b>

No	Sasaran Strategis	IKU	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target		Realisasi		%	Penjelasan Gagal/ Berhasil
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan</b>	<b>Persentase korban kekerasan anak yang terlayani</b>	100	persen	100	persen	100,00	<b>Realisasi Indikator Kegiatan 100% sama dengan target 100%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"</b>
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus anak mendapat mendampingan	76	kasus	87	kasus	114,47	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 87 lebih tinggi dari target 25 orang. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 114,47%. Indikator Kinerja masuk pada kategori <b>"Tidak Berhasil"</b>
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus anak dan perempuan yang ditangani	150	kasus	113	kasus	75,33	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 113 kasus lebih rendah dari target 150 kasus. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 75,33%. Indikator Kinerja masuk pada kategori <b>"Berhasil"</b>
			<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan penguatan dan pengembangan</b>	20	persen	20	persen	100,00	<b>Realisasi Indikator Kegiatan 20% sama dengan target 20%. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"</b>

No	Sasaran Strategis	IKU	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target		Realisasi		%	Penjelasan Gagal/ Berhasil
1	2	3	4	5	6		7		8=(7/6) x 100%	9
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya kegiatan dan dukungan manajemen BOPPA	3	kegiatan	3	kegiatan	100,00	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 3 kegiatan lebih rendah dari target 3 kegiatan. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori <b>"Sangat Berhasil"</b>
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah FAD yang mendapatkan penguatan dan fasilitasi	36	FAD	36	FAD	100,00	Realisasi Indikator Sub Kegiatan 36 FAD sama dengan target 36 FAD. Analisa Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Indikator Kinerja masuk pada kategori <b>"Sangat Berhasil"</b>

## BAB IV

### P E N U T U P

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun 2022, diukur melalui 3 (tiga) indikator utama, seperti terlihat dalam table dibawah :

**Tabel IV.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan**  
**Dan Perlindungan Anak Tahun 2022**

No	SasaranStrategis / IndikatorKinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak</b>				
<b>1.1</b>	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pontianak	1,51%	0,96%	187%
<b>1.2</b>	Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	93,98%	94,10%	100,13%
<b>1.3</b>	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Madya	Madya	Madya

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa Sasaran 1 dengan IKU 1.1 Pencapaian target 187% dan dinyatakan **sangat berhasil**, IKU 1.2 pencapaian target 100,13% dapat dinyatakan **sangat berhasil**, IKU 1.3 pencapaian target Pratama dinyatakan **sangat berhasil** mencapai target.

Pencapaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama didukung oleh 8 (delapan) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan. Pembiayaan terhadap program-program dan kegiatan-kegiatan (termasuk kegiatan rutin dan belanja tidak langsung) tersebut diperoleh dari dana APBD Tahun 2022 sebesar Rp. 14.179.151.317,00 Dengan realisasi sebesar Rp. 10.944.752.738,00 atau 77,19%.

Adapun beberapa hambatan dan kendala yang ditemui antara lain :

- 1) Belum tersusunnya dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diperdakan
- 2) Masih tingginya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) dikota Pontianak sampai dengan tahun 2021 12,70%, jauh dibawah target nasional sebesar 8,60%.
- 3) kurangnya kesadaran masyarakat dalam ber KB
- 4) masih banyak PUS (Pasangan Usia Subur) yang menggunakan ALKON Jangka pendek, angka 2021 jumlah PUS yang menggunakan MKJP 19,11%
- 5) Belum terbentuknya Pokja KKBPK dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, stakeholder dan forum masyarakat kampung KB dalam memberikan penyuluhan dan informasi tentang program-program KB serta mensukseskan program-program KB.
- 6) Meskipun PUG telah menjadi strategi nasional, tujuh Prasyarat PUG yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, alat analisis, data terpilah, dan dukungan publik, belum seluruhnya dipenuhi oleh OPD yang ada di Kota Pontianak. Integrasi gender di dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik di tingkat OPD Kota Pontianak masih harus diperkuat.
- 7) Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan
- 8) Masih tingginya rasio kekerasan terhadap perempuan yaitu 7/100.000 penduduk perempuan, pada tahun 2022 terdapat 26 kasus kekerasanterhadap perempuan
- 9) Masih rendahnya program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender, capaian tahun 2022 103 program yang telah dievaluasi

- 10) Belum terlaksananya Konveksi Hak Anak (KHA) yang dalam bobot penilaian Kota Layak Anak memiliki nilai tertinggi yaitu 60 point.
- 11) Sulitnya mengumpulkan basis data gender dan anak, karena data dimiliki oleh lintas sektoral
- 12) Masih ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan dari sikorban kekerasan kepada DP2KBP3A Kota Pontianak
- 13) Belum tersedianya informasi untuk call center pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 14) Belum maksimalnya peran Sektor swasta dan dunia usaha merupakan kelompok potensial dalam masyarakat yang memfasilitasi dukungan pendanaan yang bersumber dari alokasi Corporate Social Responsibility untuk mendukung terwujudnya KLA
- 15) Belum maksimalnya peran dalam menggerakkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan KLA.
- 16) Kasus kekerasan terhadap anak masih tinggi, tahun 2022 terdapat 87
- 17) langkah yang akan dilakukan kedepan untuk pencapaian target

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak mengupayakan berbagai langkah kebijakan berupa:

- 1) Melakukan penyusunan GDPK yang bermanfaat untuk menyediakan kerangka pikir dan panduan (road map) untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan
- 2) Menggencarkan penjaringan dan melakukan advokasi dan promosi lewat PLKB dan kelompok Tribina KB
- 3) Melakukan promosi yang efektif melalui media cetak dan elektronik serta promosi program KB melalui kampung-kampung KB yang telah terbentuk

- 4) Memaksimalkan peran kader dan PLKB dalam melakukan penjangkauan PUS dan melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan MKJP
- 5) Menyediakan Alat Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) secara gratis, dan khusus untuk MKJP Medis Operasi Wanita (MOW) dan Medis Operasi Pria (MOP) akan digratiskan pelayanannya khusus untuk masyarakat miskin yang tidak dicover oleh BPJS Kesehatan dan selain akan digratiskan, akseptor tersebut juga diberikan barang kebutuhan pokok untuk pengganti biaya hidup semasa mereka mendapatkan pelayanan pemasangan MOP dan MOW, hal ini diharapkan dapat meningkatkan penggunaan MKJP.
- 6) Memaksimalkan peran Kampung KB dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.
- 7) Membentuk Pokja KKBPK dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, stakeholder dan forum masyarakat kampung KB dalam memberikan penyuluhan dan informasi tentang program-program KB serta mensukseskan program-program KB
- 8) Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi semakin tinggi di Kota Pontianak, sehingga kesenjangan pembangunan antara Perempuan dan Laki-laki semakin mengecil.
- 9) Perspektif gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan melalui Program Pengarusutamaan Gender yang telah dilakukan setiap tahun dan terus di evaluasi untuk meningkatkan pencapaian tujuan.

- 10) melakukan Inovasi pelayanan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dengan yaitu Inovasi LARA EMAKK (Layanan Perlindungan Respon Cepat BerEmpati)
- 11) memperkuat Kader Pendamping perempuan untuk memitigasi dan pendampingan kasus kekerasan pada perempuan mulai dari tingkat kelurahan
- 12) Mengadakan Konvensi Hak Anak (KHA) yang melibatkan seluruh stackholder terkait, termasuk dari kementerian
- 13) Memaksimalkan peran swasta dengan membentuk wadah / kelompok dunia usaha yang ramah anak dan peduli akan hak – hak anak
- 14) Memaksimalkan peran masyarakat untuk mengkampanyekan dan menerapkan nilai – nilai yang menjunjung tinggi hak – hak anak untuk pencapaian Pontianak Sebagai Kota Layak Anak.
- 15) Memaksimalkan peran kader pendamping anak yang ada di setiap kelurahan sebagai ujung tombang dalam mengidentifikasi dan memitigasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 16) Lebih menggalakan lagi sosialisasi perlindungan terhadap perempuan dan anak, melalui kegiatan Kampanye Perlindungan Anak, melalui forum PUSPA, Forum Anak Daerah dan kegiatan sosialisasi yang langsung dilakukan di sekolah dan keluarahan
- 17) Membuat Call Center pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

Kebijakan pokok dan kebijakan strategis serta kebijakan yang dilakukan diharapkan akan mewujudkan tujuan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak, yaitu **“Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Peran Perempuan dan Perlindungan Anak”** dan pencapaian Visi Kota Pontianak **“PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA, BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG CERDAS DAN BERMARTABAT”**.